



INDONESIA DAN TRAGEDI KEMANUSIAAN ROHINGYA

Adirini Pujayanti*)

Abstrak

Tragedi kemanusiaan terus berlangsung di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Genosida terhadap etnis Rohingya kembali dilakukan oleh pihak militer Myanmar. Pada akhir Agustus 2017, sedikitnya 1.000 orang tewas dan lebih dari 313.0000 warga Rohingya mengungsi keluar dari Rakhine. Masyarakat internasional mengancam Pemerintah Myanmar dan penerima Nobel Perdamaian asal Myanmar Aung San Suu Kyi yang terkesan membiarkan tragedi itu terjadi. Indonesia tidak dapat berdiam diri melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine karena hal tersebut telah mengundang reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan dapat berdampak bagi perdamaian dan keamanan kawasan Asia Tenggara. DPR perlu terus mendukung langkah pemerintah Indonesia dalam upaya mencari penyelesaian damai bagi isu Rohingya.

Pendahuluan

Awal terjadinya tragedi kemanusiaan atas etnis Rohingya kali ini disebabkan serangan yang dilakukan pada 25 Agustus 2017 oleh kelompok militan Rohingya Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (*Arakan Rohingya Salvation Army - ARSA*) terhadap lebih dari 20 pos keamanan Myanmar dan sebuah pangkalan militer yang menewaskan sekitar 12 orang aparat keamanan. Otoritas keamanan Myanmar pun melakukan serangan balik. Namun serangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota ARSA, tetapi juga terhadap etnik Rohingya secara umum secara brutal. PBB memiliki bukti aksi kebrutalan militer Myanmar

terhadap warga muslim Rohingya tersebut dan mengategorikannya sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan pembersihan etnis (genosida). Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), hingga 8 September 2017 konflik Rakhine telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan lebih dari 313.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Para pengungsi Rohingya tersebut tidak lagi bertempat tinggal karena militer Myanmar membakar rumah mereka. Melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, apa upaya yang harus dilakukan Indonesia untuk mencari solusi damai?

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. *Email: apujayanti@yahoo.com*



Kritik Internasional terhadap Kepemimpinan Aung San Suu Kyi

Tragedi kemanusiaan Rohingya menjadi keprihatinan dunia. Masyarakat internasional sangat berharap tokoh demokrasi peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi asal Myanmar mampu mengatasi isu Rohingya di Rakhine. Aung San Suu Kyi menjabat sebagai penasehat negara dan menteri luar negeri. Namun, ia efektif berfungsi sebagai pemimpin Myanmar.

Pada bulan Agustus 2016 Aung San Suu Kyi telah membentuk sebuah komisi penasihat yang bertujuan untuk menyelesaikan isu Rohingya di Rakhine di bawah pimpinan Kofi Annan. Masa kerja komisi tersebut adalah setahun dan telah menyampaikan hasil kerjanya pada bulan Agustus 2017. Komisi penasihat memandang bahwa telah terjadi krisis pembangunan dan kemiskinan kronis dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Rakhine. Pemerintah Myanmar diminta berhati-hati menyikapi persoalan pemberontakan di Rakhine dan tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam menumpas gerakan bersenjata di Rakhine agar tidak memunculkan gerakan radikalisme, baik dari umat Islam maupun pemeluk Budha. Selanjutnya komisi tersebut memberikan rekomendasi untuk pemerintah Myanmar, yaitu: (1) mempertanggung-jawabkan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya; (2) memverifikasi dan upaya pemulihan kewarganegaraan Rohingya; (3) memberi jaminan kebebasan pergerakan warga Rakhine tanpa kecuali; (4) menutup kamp-kamp isolasi untuk warga Rohingya; (5) membuka akses kemanusiaan di Rakhine seluas-luasnya; (6) membuka akses media di Rakhine seluas-luasnya; (7) memberi jaminan akses pendidikan dan kesehatan warga Rakhine tanpa kecuali; (8) menggelar dialog interkomunal; dan (9) mengupayakan peningkatan perekonomian komunitas lokal Rakhine tanpa kecuali.

Rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan Suu Kyi karena ditolak rakyat Myanmar melalui unjuk rasa besar di Yangon, ibukota Myanmar. Suu Kyi dinilai gagal menerapkan agenda reformasi yang dijanjikannya dan terlalu menyederhanakan arti rekonsiliasi nasional sebagai rekonsiliasi antara militer dengan partainya serta tidak peduli terhadap isu nasional Myanmar lainnya, termasuk isu terkait minoritas. Sikap diam Suu Kyi ini juga menunjukkan masih sangat kuatnya pengaruh militer di Myanmar. Kegagalan upaya berbagai lembaga internasional untuk menghentikan

kekerasan terhadap etnis Rohingya tidak terlepas dari belum selesainya reformasi sektor keamanan Myanmar akibat dominasi militer (Tatmadaw) dalam kehidupan sosial dan politik. Berbagai inisiatif pemerintah Myanmar mengalami kebuntuan karena perlawanan dari elemen militer Myanmar.

Pemerintah Myanmar tidak memiliki upaya rekonsiliasi sehingga gerakan perlawanan Rohingya muncul dengan tokoh karismatik Ata Ullah sebagai pemimpin ARSA. Munculnya ARSA merupakan tahap baru dalam konflik isu minoritas Rohingya di Myanmar. Apabila sebelumnya muslim Rohingya hanya menjadi objek kekerasan, kini sebagian dari mereka telah memilih untuk melawan dan membangun kekuatan bersenjata. ARSA tumbuh dan mendapat dukungan dari kelompok militan internasional yang berafiliasi dengan Al Qaidah dan mantan kombatan ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*) yang tergabung dalam kelompok radikal Andaman. Kelompok ini menguat karena mendapat dukungan dari masyarakat Rohingya dan lemahnya kepolisian Myanmar. Pemerintah Myanmar menyebut serangan ARSA sebagai gerakan perlawanan masif ke arah revolusi dan menyebut mereka sebagai pemberontak garis keras Bengali. Pernyataan tersebut merendahkan Rohingya karena menyiratkan mereka sebagai pengungsi gelap asal Bangladesh. Aung San Suu Kyi mengecam kekerasan yang dilakukan ARSA dengan mengabaikan fakta bahwa kelompok tersebut tumbuh demi melindungi warga Rohingya dari kebrutalan militer selama ini.

Dampak Isu Rohingya bagi Indonesia

Indonesia tidak dapat berdiam diri melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Di dalam negeri tragedi kemanusiaan Rohingya di Rakhine telah menjadi isu politik yang mengundang reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pemerintah Indonesia sebagai negara muslim terbesar diminta segera bertindak membantu perdamaian Rohingya di Myanmar. Gedung kedutaan besar Myanmar di Jakarta menjadi sasaran pelemparan bom molotov oleh orang tak dikenal. Berbagai kelompok massa menggelar aksi bela Rohingya, antara lain di kedutaan Myanmar. Beberapa ormas keagamaan berkeinginan melakukan aksi bela Rohingya di kawasan candi Borobudur dan mengirim kadernya untuk melakukan *jihad* di Myanmar. Selain itu, terjadi aksi pengumpulan

donasi kemanusiaan untuk Rohingya secara sukarela di berbagai daerah.

Di lingkup regional, masuknya pengaruh kelompok radikal garis keras atas nama solidaritas muslim dan tumbuhnya terorisme di Myanmar telah memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan Myanmar sebagai negara tujuan baru bagi kelompok ekstremis di Indonesia dan negara lain yang akan ber-*jihad* ke luar negeri. Telah ada seruan dari kelompok-kelompok di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS dan tersebar melalui pesan dalam aplikasi *chat* Telegram, bahwa mereka "akan menjadikan Myanmar sebagai Suriah kedua". Sudah ada *fron jihad* yang didirikan oleh Al Qaida di sana, dan mereka (kelompok terafiliasi ISIS) bersaing untuk ikut terlibat di Myanmar. Terbentuknya *fron* terorisme baru di Asia Tenggara akan mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan di Asia Tenggara.

Pengungsi Rohingya yang mengalir ke Asia Tenggara memicu berkembangnya jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia, khususnya di Thailand. Sementara Indonesia sebagai negara penjunjung kemanusiaan yang berpihak pada penderitaan Rohingya telah menampung sekitar 12.000 warga Rohingya yang mengungsi sejak 2015. Meskipun bukan penandatanganan Konvensi Internasional mengenai Status Pengungsi 1951, Pemerintah Indonesia mengikuti prinsip *non-refoulement* yang melarang penolakan atas pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan karena hidup mereka terancam oleh alasan-alasan tertentu seperti alasan ras, agama, atau kebangsaan. Namun mengalirnya pengungsi Rohingya ke beberapa daerah membebani anggaran pemerintah daerah setempat karena tidak memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengurus mereka sehingga tidak ada anggaran khusus untuk itu.

Strategi Indonesia

Pemerintah Indonesia menyampaikan perhatian besar masyarakat Indonesia kepada situasi kemanusiaan di Rakhine dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan tersebut. Fokus misi Indonesia adalah menangani krisis kemanusiaan dari hulu hingga hilir. Indonesia bertindak membantu korban melalui kerja sama dengan berbagai ormas untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi.

Pemerintah Indonesia juga berupaya mencari solusi damai dengan melakukan pendekatan inklusif berupa bantuan peningkatan kapasitas, baik kepada Pemerintah Myanmar untuk menstabilkan keamanan maupun kepada Pemerintah Bangladesh untuk menangani pengungsi. Indonesia memberikan bantuan peningkatan kapasitas termasuk bagi polisi dan aparat keamanan, kemampuan diplomasi, serta memfasilitasi kegiatan *interfaith dialogue* untuk mendukung upaya rekonsiliasi di Rakhine. Kontribusi Indonesia ini sejalan dengan rekomendasi panel PBB tentang Rohingya yang dipimpin Annan.

Indonesia menyampaikan empat usulan solusi bagi masa depan Rohingya yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine. Empat elemen formula tersebut yaitu: (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama; dan (4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Keempat elemen utama tersebut harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak memburuk. Satu elemen tambahan adalah pentingnya implementasi rekomendasi dari Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin Kofi Annan sesegera mungkin.

Dalam upaya menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Rakhine yang selalu berulang, Indonesia tidak dapat bertindak sendiri. Tidak semua negara ASEAN merasa berkepentingan dengan isu Rohingya karena tidak berdampak langsung terhadap negara mereka. Indonesia harus mampu mendorong seluruh negara ASEAN untuk turut peduli terhadap krisis kemanusiaan Rohingya. Apabila hanya Indonesia yang terlibat, penyelesaian Rakhine akan sulit terjadi. Kepentingan ASEAN adalah menjaga eskalasi keamanan kawasan agar tidak dimanfaatkan oleh aktor teroris global. Oleh karena itu ASEAN tidak bisa berdiam diri karena setidaknya ada empat negara ASEAN yang terdampak langsung gelombang pengungsi Rohingya yakni Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Kunci penyelesaian dari ASEAN adalah adanya *political will* dari Pemerintah Myanmar. ASEAN harus mendorong Myanmar secara konstan dan terus-menerus untuk melakukan *political reform* dan menerima Rohingya. Myanmar telah terbantu oleh ASEAN dalam menghadapi sanksi ekonomi internasional, sehingga

ASEAN seharusnya memiliki akses terhadap pemimpin politik Myanmar. Hal ini bisa dimulai dengan keterlibatan ASEAN dalam membantu penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, tetapi melibatkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan ASEAN.

Indonesia harus mampu menggalang dukungan internasional dengan mengatasnamakan intervensi kemanusiaan karena telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dikategorikan genosida di Rakhine. Masyarakat internasional dapat bertindak atas Myanmar berdasarkan konsep hukum internasional, yaitu tanggung jawab untuk melindungi (R2P). Indonesia dapat meminta sidang darurat ASEAN untuk mengambil langkah yang tepat terhadap Myanmar, termasuk dalam hal ini usul pemberian sanksi politik dan ekonomi internasional jika Myanmar bersikeras tidak menghentikan kekerasan kepada etnis Rohingya.

Pemerintah Indonesia juga perlu bertemu dan bekerja sama dengan Pemerintah China agar negara tersebut mau membantu solusi damai isu Rohingya. China adalah sekutu terdekat Myanmar yang mempunyai pengaruh besar dalam politik dan ekonomi di negara bagian Rakhine. China mempunyai tanggung jawab yang besar atas persetujuan internasional secara diam-diam terhadap pelanggaran HAM Myanmar. China dan ASEAN tidak bisa lagi mengabaikan krisis Rohingya dengan memberikan sinyal yang menunjukkan kesan tidak ikut campur dalam masalah HAM di Myanmar. Selama ini pengabaian isu tersebut menjadi dukungan implisit bagi Pemerintah Myanmar dalam tragedi kemanusiaan Rohingya.

Penutup

DPR perlu mendukung Pemerintah Indonesia untuk terus terlibat aktif dalam menyelesaikan aksi kekerasan terhadap etnis Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Indonesia perlu melakukan tekanan geopolitik kepada Myanmar untuk menghentikan tindakan genosida Rohingya. Untuk itu Indonesia perlu mendesak ASEAN dan China untuk turut berperan menyelesaikan isu Rohingya karena masalah ini merupakan permasalahan kawasan.

DPR bersama Pemerintah Indonesia dapat membentuk kaukus diplomasi untuk menggalang kerja sama internasional menangani isu Rohingya. Diperlukan aliansi global

untuk menekan Pemerintah Myanmar agar mematuhi HAM terkait etnis Rohingya. DPR dapat meminta Pemerintah Indonesia memanfaatkan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Myanmar serta negara ASEAN lainnya untuk menjadi jembatan diplomasi bagi upaya penghentian kekerasan terhadap etnis Rohingya. Selain itu, dalam upaya membantu mencari solusi damai bagi isu Rohingya, DPR perlu menggalang diplomasi parlemen yang lebih kuat dengan parlemen negara lain dalam berbagai forum parlemen yang diikuti.

Referensi

- Haryadi, Panji. "Penyelesaian Konflik Rohingya", *Republika*, 31 Agustus 2017, hlm. 6.
- "Warga Rohingya Dicegah Pergi", *Kompas*, 28 Agustus 2017, hlm. 9.
- "Indonesia Minta Myanmar Menahan Diri", *Republika*, 28 Agustus 2017, hlm. 1.
- "Rakhine Disebut Menuju Revolusi", *Republika*, 28 Agustus 2017, hlm. 8.
- "Komjen (purn) Ito Sumardi Dubes RI untuk Myanmar: Kita Ingat Myanmar Hormati HAM", *Republika*, 28 Agustus 2017, hlm. 8.
- "Kenegarawanan Aung San Suu Kyi Diragukan", *Kompas*, 30 Agustus 2017, hlm. 8.
- "PBB: Buka Akses Kemanusiaan", *Republika*, 30 Agustus 2017, hlm. 9.
- "Indonesia Tawarkan Bantuan kepada Myanmar", *Republika*, 30 Agustus 2017, hlm. 1.
- "Suu Kyi Ditinggal Loyalis Akibat Rohingya", *Media Indonesia*, 31 Agustus 2017, hlm. 12.
- "Kofi Annan Minta Indonesia Turun Tangan", *Republika*, 31 Agustus 2017, hlm. 1.
- "Rohingya Flee: It Is All Gone", *The New York Times*, 4 September 2017, p. 1.
- "Pengungsi Asing Urusan PBB", *Media Indonesia*, 5 September 2017, p. 5.
- "Genosida Rohingya Sedang Berlangsung", *Media Indonesia*, 12 September 2017, hlm. 14.
- "Donasi Rohingya Lebih Target", *Media Indonesia*, 12 September 2017, hlm. 13.
- "Benarkah Myanmar tujuan jihad baru bagi kelompok ekstrem Indonesia?", 6 Januari 2017, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38521563>, diakses 29 Agustus 2017.